

DUKUNG VALIDITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN

Kaji Ulang Parameter Kemiskinan Kota Yogya

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya berupaya mengkaji ulang atau review atas parameter yang digunakan untuk mengukur angka kemiskinan. Upaya ini perlu ditempuh guna mendukung validitas program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah baik dari tingkat pusat hingga daerah.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo, menjelaskan angka kemiskinan di Kota Yogya pada tahun 2022 mencapai sekitar 6,62 persen atau 29,68 ribu jiwa. "Angka tersebut telah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sekitar 7,69 persen. Hal ini menunjukkan adanya indikasi perbaikan, namun angka kemiskinan harus terus ditekan," jelasnya, Kamis (23/11).

Menurutnya, strategi penanggulangan kemiskinan Kota Yogya pada tahun 2023 tetap dengan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui Bantuan Penerima

Juran JKN, Jaminan Pendidikan Daerah (JPD), PKH dan Bansos Pangan. Selain itu juga melalui program peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dengan pelatihan-pelatihan serta kesempatan dan peluang kerja. Dilakukan juga pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil melalui pembinaan dan bimbingan teknis UMKM. Singgih menjelaskan sasaran penanggulangan kemiskinan tahun 2023 bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dirilis Kemensos. Data itu lantas di-

lakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menurutnya, parameter yang digunakan akan berpengaruh terhadap kekuatan data dan sasaran tertentu. Sehingga, review parameter perlu diperbarui sehingga menghasilkan data yang lebih valid dan menggambarkan kondisi riil keluarga miskin.

"Data sasaran kemiskinan menjadi penting karena menjadi basis penting dari suatu intervensi dan bahkan menjadi dasar sejak disusunnya perencanaan program penanggulangan kemiskinan. Tentu saja data sasaran yang dimaksud harus valid dan terolah dengan baik," terangnya.

Pada tahun 2024 Kota Yogya mendapat kuota sejumlah 587 keluarga lansia melalui program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) oleh Penda DIY. Hal tersebut merupakan pro-

gram percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem berupa pemenuhan kebutuhan pokok lansia dalam bentuk voucher yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY.

"Pemenuhan kebutuhan pokok ini dalam bentuk voucher yang dapat digunakan di toko-toko yang telah ditentukan. Harapannya, agar dapat digunakan dengan bijak," tambahnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogya Agus Tri Haryono, menjelaskan parameter yang telah digunakan sejak satu dekade lalu dirasa sudah tidak tepat pada kondisi saat ini dan mempengaruhi keakuratan data sasaran kemiskinan pada tahun 2023. Berapa indikator yang dirasa sudah tidak relevan misalnya pada penggunaan daya listrik 450 KWH, status suami atau istri bekerja serta tingkat pendapatan perkapita.

"Selain itu juga ada kebutuhan untuk memasukkan indikator lainnya sesuai dengan isu strategis yang berkembang dan pertemuan di lapangan misalnya berkaitan dengan penyandang disabilitas yang dalam parameter sebelumnya belum diakomodir dan penyakit kronis yang tiba-tiba terjadi ini menyebabkan goyahnya kondisi keuangan keluarga," ungkapnya.

Harapannya, dengan dihasilkan parameter baru ini dapat menjadi acuan dalam pendataan sasaran kemiskinan serta menghasilkan data yang lebih akurat sesuai dengan kondisi keluarga. Acuan yang terdiri tujuh aspek yaitu pendapatan dan aset, pangan, sandang, kesehatan, pendidikan dan sosial terdapat beberapa parameter yang disertai dengan bobot skor yang akan dikaji ulang agar lebih relevan. (Dhi)-f

INOVASI PENGANTARAN OBAT TANPA ANTRE RS Jogja Miliki Layanan 'Otewe Masjo'

YOGYA (KR) - RSUD Kota Yogya atau RS Jogja kini memiliki layanan Obat Teko Dewe Rumah Sakit Jogja (Otewe Masjo). Inovasi untuk pengantaran obat tanpa antri tersebut dimanfaatkan warga Kota Yogya maupun luar kota.

Wakil Direktur Pelayanan RS Jogja Avy Susantini, mengatakan layanan itu sudah diluncurkan pekan lalu. Adanya layanan Otewe Masjo ini berangkat dari banyaknya antrian obat dari pasien yang cukup panjang di RSUD Kota Yogya. "Dengan demikian layanan Otewe Masjo ini harapannya dapat meningkatkan mutu pelayanan khususnya di bidang kesehatan di RSUD Kota Yogya," ungkapnya, Kamis (23/11).

Selain itu, layanan Otewe Masjo ini dapat memberikan kenyamanan, efisiensi, menghemat waktu dan tenaga bagi pasien rawat jalan. Bagi pasien RSUD Kota Yogya bisa mengunduh aplikasi Otewe Masjo melalui Scan QR Code. Layanan Otewe Masjo bisa digunakan setelah pasien melakukan pemeriksaan di dokter.

Dari data pasien kemudian di transfer ke farmasi menggunakan e-rekam medis. Selanjutnya, jika pasien ingin mengambil obat langsung menuju kebagian farmasi, kemudian mengambil antrian dari nomor antrian bisa langsung memilih untuk mengambil obat secara mandiri di farmasi, ataukah menggunakan Otewe Masjo.

Jika menghendaki obat diantar ke rumah menggunakan Otewe Masjo akan dibantu

untuk mengakses menggunakan QR Code di stan yang sudah disediakan. Ketika sudah melakukan proses pemesanan, lalu akan segera diantarkan oleh kurir Otewe Masjo. "Layanan pengantar obat ini bersifat sukarela, cukup membayar Rp 10.000 saja, pasien bisa menunggu obat di rumah," ujarnya.

Walaupun layanan ini bukan yang pertama di DIY, Avy Susantini berharap, layanan ini akan mempermudah pasien dan keluarga serta dapat meningkatkan mutu pelayanan. Obat yang diantar juga berbagai jenis mulai dari obat yang ringan sampai berat. "Obat seperti Insulin yang harus pakai air cooler ini juga bisa diantar, sudah kita sediakan, dan untuk pengantaran kita sameday atau dihari yang sama agar pasien tidak menunggu obat terlalu lama," imbuhnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogya Ir Aman Yuridijaya MM, mengungkapkan layanan pengantaran obat tanpa antri atau Otewe Masjo sangat luar biasa. Dirinya mengapresiasi inovasi yang dimiliki oleh RSUD Kota Yogya tersebut. Selain menghemat waktu dan tenaga, Aman berharap layanan itu akan terus dilakukan untuk mempermudah pasien mendapatkan obat lebih cepat.

"Layanan ini mampu menghemat satu dua jam. Sehingga akan menghemat waktu dan biaya. Layanan ini sangat luar biasa. Semoga berjalan dengan lancar dan dapat mempermudah pasien mendapatkan obat lebih cepat," ungkapnya. (Dhi)-f

Dari Yogya, Bangkitkan Semangat Kejayaan Radio Siaran

YOGYA (KR) - Gempuran media sosial dan media baru yang semakin deras diyakini tidak akan mampu menggeser posisi radio sebagai salah satu media mainstream di tengah masyarakat. Radio tidak akan pernah hilang dan tetap menjadi legenda.

Hal tersebut yang muncut dalam kegiatan 'Diseminasi Penyusunan Pedoman Radio Akademik' yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dengan dukungan KPID DIY di Aula Diskominfo DIY, Kamis (23/11). Kegiatan yang dimoderatori Ahmad Basith (KPID Jawa Barat) tersebut menghadirkan narasumber Yohanes Suyanto (KPID DIY) dan Dendan Ronggo Astono (Phoenix Radio Bali).

Selain itu juga turut hadir sejumlah Komisioner KPI Pusat, yakni I Made Sunarsa (Korbid Kelembagaan), Amin Shabana, Mimah Susanti, Evri Rizqi Monarshi serta



KR-Febriyanto

Narasumber Diseminasi Penyusunan Pedoman Radio Akademik di Aula Diskominfo DIY.

Sekretaris KPI Pusat Umri. Jajaran KPID DIY juga turut serta mendampingi, yakni Dewi Nurhasanah (Ketua), Agnes Dwirujiyati (Wakil Ketua), I Made Arjana Gumbara, Noviati Roficoh, Hazwan Iskandar Jaya dan Febriyanto.

"Mulai dari Yogyakarta ini kami ingin membangkitkan lagi semangat radio di Indonesia," tutur Korbid Kelembagaan KPI Pusat I Made Sunarsa yang juga penanggung jawab kegiatan di sela-

nya yang terkait dengan industri penyiaran radio," jelas mantan Ketua KPID Bali tersebut.

Sementara Komisioner KPID DIY Yohanes Suyanto dalam paparannya menyebutkan banyak kendala yang dihadapi radio untuk terus tumbuh dan berkembang. Selain persoalan SDM, keberadaan media sosial yang terus menerobos semua sendi kehidupan serta minimnya pemasukan dari iklan menjadi persoalan sendiri.

Sehingga tidak sedikit radio yang mengambil inisiatif rasional, seperti mengurangi karyawan, mengurangi jam siaran serta menurunkan kekuatan poser pemancar untuk efisiensi. "Radio Akademi ini sangat diharapkan menjadi solusi. Tentu juga peran serta perhatian pemerintah menjadi penting untuk eksistensi radio di masa mendatang," ungkapnya. (Feb)-f

Kemdikbudristek PMPK Kunjungi Homeschooling HSPG



KR-Devid Pemarna

Tim Satgas PMPK Kemdikbudristek bersama pimpinan dan guru Homeschooling HSPG.

YOGYA (KR) - Homeschooling HSPG menerima kunjungan Tim Satuan Tugas Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Selasa (21/11). Tim tersebut ingin mengetahui program-program inovatif di Homeschooling HSPG khususnya dalam pembelajaran inklusif untuk peserta didik/anak berkebutuhan khusus (ABK).

Direktur Homeschooling HSPG, Ir Kusnanto MM mengatakan, kunjungan tersebut merupakan suatu kehormatan bagi Homeschooling HSPG karena menjadi salah satu barometer nasional sekolah nonformal untuk pembelajaran inklusif. "Dengan kunjungan ini berarti program-program inovasi dari kami (Homeschooling HSPG) dipantau dan dilihat oleh kementerian pusat. Ini suatu kebanggaan bagi kami," kata Kusnanto.

Selain menerima kunjungan dari tim satgas Direktorat PMPK Kemdikbudristek, Homeschooling HSPG juga menerima kunjungan Tim Kerja Regulasi dan Tata Kelola Satuan Pendidikan, pada Kamis (23/11) terkait Implementasi Kurikulum

Merdeka (IKM). Tim terdiri Thuarita Cahyawati SSos (Widyapra Ahli Muda) dan Lisbeth Napitupulu MPd (Praktisi Pendidikan). Homeschooling HSPG sendiri telah menerapkan IKM di semua jenjang.

Menurut Kusnanto, setiap murid Homeschooling HSPG, baik itu murid inklusi maupun reguler melalui proses asesmen psikologi maupun akademik. Ini untuk mengetahui potensi/bakat anak maupun problematika yang dihadapi murid. Sehingga akan tepat dalam memberikan program pembelajaran disesuaikan bakat dan kemampuan masing-masing anak.

"Ada tiga konsep dalam pembelajaran inklusi di Homeschooling HSPG, yaitu terapi untuk menghilangkan hambatan anak, bina diri untuk melatih kemandirian

anak, dan tes bakat minat dan kemampuan, anak bisa didorong pada keterampilan vokasinya atau akademiknya," terang Kusnanto.

Kabag Psikologi Homeschooling HSPG, Astrid Rosaria C SPSi mengatakan, asesmen diberikan di awal murid masuk sekolah. Hasil dari asesmen menjadi acuan dalam menyusun rencana pendidikan inklusi bagi murid ABK. Adapun program inovasi dalam rangka pengembangan diri murid ABK di Homeschooling HSPG, selain pembelajaran di kelas, ada program rumah sahabat, di mana murid diajak berkunjung ke rumah temannya yang di dalamnya disisipkan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

Sementara itu, Kabag Akademik Homeschooling HSPG, Lilis Retnowati SSI mengatakan, setelah diketahui hasil asesmen dan rencana pembelajaran inklusinya, maka diteruskan kepada guru yang akan mendampingi anak belajar. Hal ini penting agar materi yang diberikan guru, benar-benar sesuai dengan kemampuan anak ABK. "Kita juga sampaikan ke orang tua, agar sinergis demi kemajuan pendidikan anak," katanya. (Dev)-f

PENGUMUMAN (Tentang Sertipikat Hilang)					
Nomor : 22/2023					
Untuk mendapatkan sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :					
No	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Alamat Pemegang Hak	Tanggal Pembukuan	Keterangan
1	11.28.08.04.1.00683	JENNY HARJANTI alias TJOA LIAN Kec. Madukara Kab. Banjarnegara	Kel. Kutabanjarnegara Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara	28/12/1998	

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut di atas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Kepala Kantor Pertanahan KantorPertanahan Kabupaten Banjarnegara
Ttd
NURDIN KAREPESINA, S.Si.
NIP. 19670616.199103.1.004

PENGUMUMAN (Tentang Sertipikat Hilang)					
Nomor : 23/2023					
Untuk mendapatkan sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :					
No	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Alamat Pemegang Hak	Tanggal Pembukuan	Keterangan
1	11.28.11.11.1.00102	SUWARNO	Desa Lengkok Kec. Rakit Kab. Banjarnegara	30/12/1974	

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut di atas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Banjarnegara, 17 November 2023
Kepala Kantor Pertanahan KantorPertanahan Kabupaten Banjarnegara
Ttd
NURDIN KAREPESINA, S.Si.
NIP. 19670616.199103.1.004



DPRD KOTA YOGYAKARTA

SUARA WAKIL RAKYAT

JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

BERSAMA MENJAGA ESTETIKA YOGYA

Pemasangan Peraga Kampanye Harus Selaras Aturan

YOGYA (KR) - Masa kampanye Pemilu 2024 tinggal beberapa hari ke depan. Seiring dengan itu keberadaan peraga kampanye juga akan semakin merebak. Pemasangan peraga kampanye tersebut diharapkan mampu diselenggarakan dengan aturan sebagai bentuk kesadaran bersama menjaga estetika Kota Yogya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogya Imanuel Ardi Prasetyo, menjelaskan Pemkot Yogya telah menerbitkan Perwal 75/2023 sebagai acuan pemasangan alat peraga kampanye maupun bahan kampanye.

"Harapan kami semua pihak terutama peserta pemilu bisa saling menjaga. Yogya adalah kota tujuan wisata sehingga estetika kota harus diperhatikan. Jika peraga kampanye bisa dipasang dengan rapi dan lebih menarik, justru Yogya bisa menjadi percontohan bagi daerah lain," tandasnya.

Dalam Perwal 75/2023 terdapat beberapa jalan serta tempat yang menjadi area larangan pemasangan peraga kampanye. Setidaknya ada sembilan ruas jalan utama seperti Jalan Jenderal Sudirman, Diponegoro, Margo Utomo, Malioboro dan lainnya. Begitu pula di kawasan cagar budaya, tempat

Immanuel Ardi Prasetyo
Fraksi PDI Perjuangan



KR-Istimewa

ibadah, jembatan, tiang listrik, tiang telepon serta lain sebagainya.

Menurut Ardi, aturan pemasangan peraga kampanye yang diterbitkan oleh Pemkot sebetulnya sudah mengakomodir kepentingan semua pihak. Penyelenggara pemilu serta peserta pemilu juga sudah dikomunikasikan sebelum Perwal 75/2023 ditetapkan. Oleh karena itu seiring mendekati masa kampanye pada 28 November 2023 mendatang, diharapkan sosialisasi mengenai aturan itu dapat digencarkan.

"Ketika semua bisa saling menjaga agar tidak ada pelanggaran dalam pemasangan peraga kampanye maka akan tercipta suasana yang sangat kondusif. Bahkan keberadaan

peraga kampanye bukan semata bagian dari membangun citra peserta pemilu namun menjadi penanda bahwa kita siap menyukseskan hajat Pemilu 2024 yang tertib," urainya.

Oleh karena itu, ketika ada pelanggaran maka instansi terkait lebih mengedepankan persuasif serta komunikatif. Penegakan atas pelanggaran juga tidak boleh tebang pilih melainkan penuh tanggung jawab.

(Dhi)-f



PENGUMUMAN

PENJUALAN AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) DI MUKA UMAM

Sebidang tanah pertanian beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya dalam Sertifikat Hak Milik No. 838 Luas 1.965 m2 terletak di Desa Tawang Sari, Kec. Pengasih, Kab. Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
PT BPR Juwana Artha Sentosa
Jl. Komodo No. 32, Juwana, Pati
Telp. (0295) 471488 / WA. 0813 2629 6688